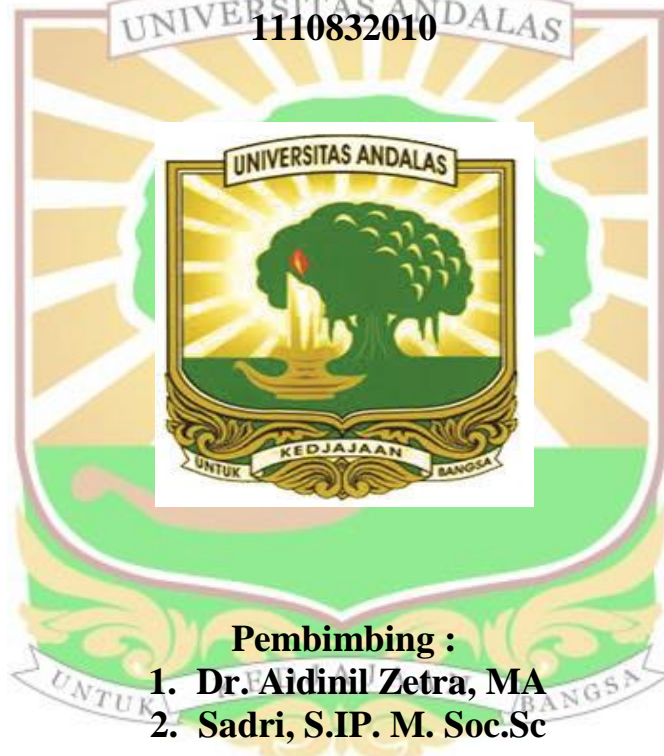


**RESOLUSI KONFLIK ANTARA KAUM SUKU TANJUNG
DENGAN PEMKO DALAM PROYEK PELEBARAN JALAN
BY PASS DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Oleh

**WEGI GUSTI AFFARI
1110832010**



Pembimbing :

- 1. Dr. Aidinil Zetra, MA**
- 2. Sadri, S.IP. M. Soc.Sc**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

ABSTRAK

Wegi Gusti Affari, BP.1110832010, Resolusi Konflik Antara Kaum Suku Tanjung Dengan Pemko Dalam Proyek Pelebaran Jalan *By Pass* Di Kecamatan Kuranji Kota Padang, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2017.

Pembimbing I: Dr. Aidinil Zetra, MA, dan Pembimbing II: Sadri, S.IP, M.Soc.Sc

Kebijakan pemerintah Kota Padang untuk melakukan penataan jalan tanah *By Pass* Kota Padang diawali pada tahun 1980. Saat itu pemerintah berkeinginan menata jalan *By Pass* menjadi jalan yang lebih hidup dengan memperbesar jalan *By Pass* dan menjadi dua jalur. Pada saat perencanaan telah ditetapkan dengan sistem konsolidasi dan disetujui oleh semua pihak pemerintah maupun masyarakat, namun yang terjadi pada Juli 2016, konflik mulai terjadi di sepanjang jalan *By Pass*. Salah satunya pada *By Pass* KM 10 Pilakut Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis resolusi konflik yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat di KM 10 Pilakut Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian studi kasus dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis etik dan emik. Teori yang dipakai resolusi konflik menurut Dahrendorf.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang telah melakukan konsiliasi dan mediasi, tapi masih belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Konflik internal yang terjadi di dalam kaum Suku Tanjung membuat proyek pelebaran jalan menjadi terhambat. Salah seorang kaum Suku Tanjung yaitu Syamsimar Syam meminta akan sertifikat tanah yang dijanjikan akan diganti pemerintah itu atas nama pribadinya, namun adanya penolakan dari saudara-saudaranya yang menginginkan tanah tersebut masih tetap atas nama kaum. Pengaturan resolusi konflik menurut Dahrendorf tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Gagalnya pengaturan resolusi konflik yang dilakukan pemerintah disebabkan oleh kaum Suku Tanjung mempunyai konflik internal dan pemerintah masih bertahan akan kepentingannya.

Kata Kunci : Resolusi Konflik, Masyarakat, Pemerintah.

ABSTRACT

Wegi Gusti Affari, BP.1110832010, Conflict Resolution between Kaum Suku Tanjung and City Government in By Pass Road Widening Project at Kuranji District of Padang City, Department of Political Science Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2017.

1st Advisor : Dr. Aidinil Zetra, MA, and 2nd Advisor : Sadri, S.IP, M.Soc.Sc

The governments' policy about the road arrangement of Padang City has started from 1980. The government wanted to make the *By Pass* road better with make it into two ways. The policy has applied by consolidation system and agreed by All parties of government and society. Than, The conflict has happened at all of the *By Pass* road since July 2016. One of them is Pilakut Village at *By Pass* Km 10 *Kelurahan Gunung Sarik, Kuranji* Regency.

This research aims to describe and analyze the resolution of the conflict made by the government to the community in *KM 10 Pilakut Gunung Sarik* Village *Kuranji* District with used qualitative research method with descriptive research design in nature. The technique of collecting data who did by the researcher was depth-interview, documentation, and also observation. In order to select the research informant, the researcher used purposive sampling technique. The data analyzed by using ethical and emic analysis technique. The theory used by conflict resolution according to Dahrendorf.

The result of this research shown that the government of Padang City has done *konsiliasi* and *mediasi*, but can not solve the problem yet. The internal conflict in *Kaum Suku Tanjung* caused the problem of the widening road project. One of *Kaum Suku Tanjung* of the Syamsimar Syam called for a certificate of land promised to be replaced by the government on his personal behalf, but the rejection of his brothers who wanted the land still remain in the name of the people. Conflict resolution setting stated by Dahrendorf did not show the significant result. The failure conflict resolution of government caused by the internal conflict of *Kaum Suku Tanjung* and self intereset of the government.

Keywords: Conflict Resolution, Society, Government.